

PENDAHULUAN

BAB I

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan suatu media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Lakip.

Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Tahunan sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagaimana dimaksud.

A. GAMBARAN UMUM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi "Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di undangkan" serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Urgensi dari langkah pembentukan kelembagaan ini didasarkan kepada realitas bahwa pemerintah provinsi sebagai bagian penyelenggara pemerintahan negara dan penyelenggara fungsi pelayanan publik, mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mewujudkan terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa dan politik. Sebagian tugas lembaga tersebut adalah sebagai lembaga yang melakukan pembinaan integrasi nasional/bangsa sesuai dengan paradigma baru kehidupan berdemokrasi.

Format otonomi yang luas telah menitikberatkan pelaksanaannya diletakkan pada daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi selain sebagai Daerah Otonom juga merangkap sebagai wilayah administrasi atau menjadi wakil pemerintah pusat, sehingga provinsi harus dapat berperan sebagai pengikat hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan mendasar lainnya adalah yang berkaitan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kalimantan Barat pada khususnya. Keanekaragaman budaya yang ada terjalin serasi dan harmonis merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kemajemukan tersebut mempunyai kerawanan konflik dan apabila tidak ditangani secara serius akan mengarah kepada gejala disintegrasi bangsa, yang merupakan ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterpurukan yang berlarut-larut akibat konflik yang melebar, merupakan ancaman terjadinya disintegrasi bangsa dalam arti melemahnya kendali pemerintah, mencairnya perekat persatuan dan kesatuan, retaknya solidaritas sosial dan meningkatnya rasa tidak aman di tengah-tengah masyarakat.

1. Susunan Organisasi

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2010 bagian kedua, pasal 4 dikatakan bahwa struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

a. Kepala Badan;

Tugasnya adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat;

Tugasnya adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset.

c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;

Tugasnya adalah menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang partai politik dan pemilu serta organisasi kemasyarakatan dan LSM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Bidang Nilai-nilai Kebangsaan;

Tugasnya adalah menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang pengembangan nilai-nilai Ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik;

Tugasnya adalah menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang kewaspadaan dini, penanganan konflik sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

f. Bidang Budaya dan Partisipasi Politik;

Tugasnya adalah menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang pendidikan budaya politik dan partisipasi implementasi kebijakan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (Bagan Struktur Organisasi terlampir).

2. Tugas pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2010 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Provinsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga, nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, kewaspadaan dan penanganan konflik serta budaya dan partisipasi politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hubungan antar lembaga, nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan penanganan konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang hubungan antar lembaga, nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, kewaspadaan dan penanganan konflik serta budaya dan partisipasi politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar lembaga, nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, kewaspadaan dan penanganan konflik, serta budaya dan partisipasi politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar lembaga, nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial

- budaya, kewaspadaan dan penanganan konflik serta budaya dan partisipasi politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi hubungan antar lembaga, nilai-nilai kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, kewaspadaan dan penanganan konflik serta budaya dan partisipasi politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - h. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diserahkan oleh Gubernur.

Upaya untuk mewujudkan Visi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan tugas pokok dan misi yang diemban, sudah barang tentu dengan memanfaatkan faktor-faktor penentu yang mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi. Untuk itu diperlukan analisa dan perhitungan yang cermat terhadap gambaran visual seluruh faktor eksternal dan internal organisasi sebagai instrument untuk mengintegrasikan peluang (*Opportunity*), dan ancaman/tantangan (*Threat*) disatu pihak dengan kekuatan (*Strenght*), serta kelemahan (*Weakness*) organisasi dilain pihak.

Analisa tersebut akan menghasilkan beberapa tujuan dan sasaran, dimana strategi pencapaiannya dilakukan melalui penjabarannya kedalam kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sumber daya keuangan sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*).

4. Sumber Daya Aparatur

Kondisi atau formasi Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat saat ini berjumlah 48 orang, terdapat 1 orang PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan

Barat yang diperbantukan di KPU, 1 orang pegawai magang dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan 11 Orang tenaga honor, dengan rincian 1 (satu) orang pejabat eselon II.a, 5 (lima) orang pejabat eselon III.a, 10 (sepuluh) orang pejabat eselon IV.a dan 32 (tiga puluh tiga) orang staf/non struktural umum.

Tabel 1.1

**Jumlah Pegawai, Kualifikasi, Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.**

No	Pangkat / Gol. Ruang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	Sarjana Muda	SMA	SMP	SD	
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	-	-	-	-	-	2
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	4	-	-	-	-	-	4
3.	Pembina (IV/a)	3	1	-	-	-	-	4
4.	Penata Tk. I (III/d)	3	5	1	-	-	-	9
5.	Penata (III/c)	1	2	-	-	-	-	3
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	1	-	7	-	-	10
7.	Penata Muda (III/a)	-	1	1	4	-	-	6
8.	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	1	2	-	-	3
9.	Pengatur (II/c)	-	-	-	5	-	-	5
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	2	2
12.	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
J u m l a h		15	10	3	18	-	2	48

Keadaan Desember 2019

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEPALA	SEKRETARIS	KABID	KASUBBAG / KASUBBID	STAF	JUMLAH PEGAWAI
1.	S2	1	1	4	4	5	15
2.	S1	-	-	-	6	4	10
3.	DIPLOMA	-	-	-	1	2	3
4.	SLTA	-	-	-	-	18	18
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	2	2
	JUMLAH						48

Keadaan Desember 2019

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

- a. Gedung kantor
- b. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- c. Peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Mobil Jabatan/Mobil Dinas, kendaraan operasional
- e. Peralatan dan perlengkapan untuk pemeliharaan mobil jabatan/mobil dinas, kendaraan operasional.
- f. Air, telepon dan Listrik beserta komponen pendukungnya
- g. Peralatan dan perlengkapan untuk kebersihan kantor
- h. Alat tulis kantor
- i. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga
- j. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- k. Bahan logistik kantor

6. Sumber Dana

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat mendapat dukungan dana dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 4.479.661.013,40- yang terealisasi Rp.4.170.130.495,- atau 93,09%. Alokasi dana anggaran untuk setiap program dan kegiatan terangkum dalam tabel berikut :

TABEL 1.3
Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dari Dana APBD

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI DANA TA. 2019 (Rp)
1	2	3
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.270.264.363,40
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,-
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	105.000.000,-
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	15.650.000,-
4.	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.300.000,-
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5.779.500,-
6.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	124.470.000,-
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55.888.500,-
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.769.800,-
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,-
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.250.000,-
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8.342.000,-
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	3.450.000,-
13.	Penyediaan Makanan dan Minuman	66.000.000,-
14.	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	320.162.013,-
15.	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran lainnya	316.807.550,40
16.	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	115.250.000,-

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI DANA TA. 2019 (Rp)
1	2	3
17.	Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	17.650.000,-
18.	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	24.195.000,-
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	285.250.250,-
1.	Pengadaan Perlengkapan /Peralatan Kantor	35.650.000,-
2.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	128.440.250,-
3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional.	66.760.000,-
4.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/Kipas Angin	10.000.000,-
5.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	44.400.000,-
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.100.000,-
1.	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	34.100.000,-
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	175.416.000,-
1.	Pembinaan Jasmani dan Rohani	136.218.000,-
2.	Penyusunan Penetapan Kinerja	13.931.000,-
3.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	25.267.000,-
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	338.205.200,-
1.	Penyusunan Laporan Keuangan	35.250.000,-
2.	Penyusunan LAKIP.	15.000.000,-
3.	Penyusunan Renstra	28.020.900,-
4.	Penyusunan RENJA SKPD	25.000.000,-
5.	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	20.879.000,-
6.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	66.206.000,-
7.	Penyusunan RKA SKPD, dan DPA SKPD	25.000.000,-
8.	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	122.849.300,-
VI.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	646.045.900,-
1.	Posko dan Pemantauan/Supervisi Pilpres dan Pileg Tahun 2019	112.453.500,-
2.	Sosialisasi Budaya Politik Santun	357.602.800,-
3.	Fasilitasi Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Kalbar Tahun 2019	69.011.800,-
4.	Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2019	58.165.000,-
5.	Pembinaan Kepada Partai Politik	48.812.800,-

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI DANA TA. 2019 (Rp)
1	2	3
VII.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	411.826.400,-
1.	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	135.963.900,-
2.	Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan	17.298.000,-
3.	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	101.925.500,-
4.	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	85.907.000,-
5.	Rakor Forum Pembauran Kebangsaan	34.518.600,-
6.	Pemutakhiran Data Ormas se Kalimantan Barat	36.213.400,-
VIII.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN AGHT	1.318.552.900,-
1.	Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat	67.319.900,-
2.	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	169.813.300,-
3.	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	402.801.000,-
4.	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah	125.643.500,-
5.	Pemantauan Penanganan Masalah Kebangsaan dan Politik	100.799.400,-
6.	Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU Sederajat	172.550.000,-
7.	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	166.649.800,-
8.	Penyusunan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor	112.976.000,-
	J U M L A H	4.479.661.013,40

Selain itu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan yang kuat (political will) Pimpinan Pemerintah/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Adanya struktur organisasi yang kuat dan profesional dengan dukungan sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

3. Adanya payung hukum yang dapat diterapkan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
4. Adanya informasi data yang valid serta partisipasi seluruh elemen masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan serta perencanaan yang tepat terhadap program dan kegiatan.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Secara garis besar dalam menjalankan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2019 tidak terlalu menghadapi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan semua kegiatan.

Adapun permasalahan internal yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yaitu keterlambatan dari pelaksana kegiatan dalam memenuhi kelengkapan Surat PertanggungJawaban dikarenakan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat.

Kedepannya diharapkan SDM yang ada untuk lebih ditingkatkan kompetensinya dalam penyelesaian administrasi SPJ Keuangan sehingga laporan SPJ keuangan bisa terlaksana dengan tepat waktu sesuai yang diharapkan dan juga dapat lebih jeli dalam perencanaan penganggaran sehingga realisasi bisa tercapai semaksimal mungkin. Selain itu lebih mengoptimalkan capaian kinerja di Tahun 2019 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat akan mengajukan kembali anggaran untuk program dan kegiatan yang belum dapat tertampung di APBD Tahun 2019.

Adapun permasalahan eksternal yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- Tidak semua Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan pokok yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga tidak terbentuk sinergisitas kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Lambatnya informasi yang disampaikan oleh satuan/unit kerja pelaksana fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten/Kota.